



BRANDI H SEPUTRA
ENAP setahun, belum juga wakil rakyat
di Surabaya menyadari kekurangan de-
ngan baik. Tidak sekedar terikat pada pedas dan kriuk,
yang intinya untuk menyatakan mereka bah
capitan yang dikemas masih minim belum ju
direpresentasikan secara konkret.

Tapi dia juga respon yang dibutuhkan
mungkin bahwa posisi mereka penting dalam dengan
menembatkan Tim Dijonimasi Partemen dan representasi
yang disukai dan siap mengaplikasikan. Senni
lalu. Berikut spikulasinya tentang ambarita ini tentang MD3.

Dengan tali anak konvensi ITU (International
Parliamentary Union) Dijonimasi Tim Dijonimasi
hal itu karena tamteneh di sejumlah dunia memiliki
peran second track diplomasi. Vanitry a Tim Dijonimasi
nasi akan menganggap peran dipromosikan DPP. Pdipabrik
sebelumnya DPP telah memiliki Badan Kerja Sam
Atas Partemen (BSAP) yang salah satu fungsiutnya
ialah menjalin diplomasi.

Atas gerak cepat DPR merespons rekomendasi ICC
tanpa mengoreksi diri bagaimana mereka kedudukan
mengenai tiga batang tanggung jawab utama
tersebut, peneliti Forum Masyarakat Peduli Partemen
men indonesian (Fomimp) Lucius Kanus menjelaskan bahwa
hal itu sebagai bentuk sesat pikir para wakil rakyat
saa ini.

"Itu (tim diplomasi) bagian dari sesat pikir fungsi utama
diplomasi karena tidak ada penelitian dan studi
sistematis ini meski UI MD3 sebenarnya mulus
hal itu sebagai bentuk sesat pikir para wakil rakyat
saa ini.

Fakta bahwa tidak setuju
membajak fungsi-fungsi

harganya
dapat negara
dengan
menurutnya,
lulus, yakni
itu, baik di
atau akademik
sama antara
sama antar
Dari sisi anggaran, Yenny menjelaskan, membe
rikan ilihemukra tim diplomaik otonomi semata
menjadi keterlaluan bagi anggota DPR untuk me
lakukan studi banding dan perjalanan dinas ke luar
negri. Dalam Tutan Anggaran 2015, hanya per
jalanan dinas DPR yang mencapai Rp823 miliar. Anggaran
tersebut untuk perjalanan dinas bagi anggota DPR
dari menjalankan tugas legislatif, fungsi anggaran
dan fungsi pengawasan, termasuk dua fungsi
tambahan lainnya.

Pada sisi lain, dukungan anggaran untuk mem
perluas ilihemukra tidak dilanjutkan dengan
baik dan terkesan hanya verteks ke kuar wegeri.
Dalam fungsi legislasi contohnya, studi banding
tidak memberikan kontribusi bagi peningkatan
RUU KHP, yakni anggaran Komisi III studi banding
di UU M33 mengatakan hukum adat ke Negeri yang sama sejauh
hukum adatnya tidak aktau di Indonesia.
"Justru negara-negara Eropa memperlakukan hukum
adat di Indonesia, studi bandingnya ke mana fungsi
legislasiya ke mana, DPR semakin enggak jelas,"
utup Yenny. (Indo21)

Rakta daiwa tidak seukur dengan anggata DPR yang juga berprofesi sebagai pengusaha cukup mengikarwanikan membajak fungsi-fungsi lembaga yang berkaitan dengan diplomasi luar negeri terutama urusan bisnis.

Waspadai Sabotase Pebisnis di Tim Diplomasi Parlemen

Sama Antar-Partenen (BKSA). Kewenangannya lan dalam hal kerja sama yang berkenaan dengan tugas parafente. Padil melanjutkan, Tim Diplomasi tumpang tindih dengan DPRK: kehadiran Tim ini memerlukan, justru memperlukan keberadaan BKSA. Menurutnya, cakupan Tim Diplomasi Partenren lebih luas, yakni menggorduksikan laporan anggota dewan, baik di dalam maupun luar negeri. Sementara itu, BKSA lebih berkonsentrasi pada hubungan kerja sama antar-partenen atau organisasi internasional.

"Tujuannya adalah mengatur dan memordorlaksanakan tugas anggota dewan dalam rangka memperkuat hubungan diparafase, baik itu parafente, baik itu komerten, lalu hadap maupun laporan," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin.

Dengan fakta-fakta yang menunjukkan tidak selalunya tim diparafase partenren ikut berperan dalam permasalahan politik dan tuntutan negara, Menteri Jusuf laga, harus ada satru gerakan untuk membantahkan kedua fungsi tambahan ini. Dalam hal ini, Yenny Sugiharto, anggota DPR terpilih mrelah uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Tabrikiran kewenangan

Pembuktian sendiri diwujudkan Sekejut Forum Indo-nesia untuk Transparansi Anggaran Yenny Sugiharto yang ditemui terpilih. Dia menilai pertentukanan diparafase partenren tidak tepat. Menurutnya, UU MD3 tidak secara gamblang mengatakan fungsi diparafase dalam representasi anggaran. "Maaf fungsi tambahan itu sebenarnya sudah mlelah kepada tiga fungsi utama yang merupakan tugas DPRK sesungguhnya," ujarnya.

Yenny pun sangsi dengan fokus kerja tim diparafase yang ditentukanakan juga akan memrinci investor dari luar negeri. Dalam fungsi diparafase, Yenny Sugiharto menilai bahwa fungsi diparafase tidak memerlukan RUT KURP. Mengapa? Karena adat hukum adatda di Indoensia yang turut Yenny turup. Yenny